

KEKUASAAN POLITIK DALAM ISLAM PERSPEKTIF SUNNAH DAN SYI'AH



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUSOFFA

NIM. 89340665

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. H. ZARKASYI ABDUL SALAM**
- 2. DRS. H. FUAD ZEIN, M.A**

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1998**

Drs. H. Zarkasyi Abdul Salam
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Musoffa
Lamp. : 1 Bendel

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Musoffa
NIM : 89340665
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Kekuasaan Politik dalam Islam Perspektif Sunnah dan Syi'ah.

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian, semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Rabi'ul Awwal 1417 H
18 Juli 1997 M

Pembimbing I

Drs. H. Zarkasyi Abdul Salam
NIP. 150046306

Drs. H. Fuad Zein, M.A
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Musoffa
Lamp. : 1 Bendel

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan-perbaikan
seperlunya terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Musoffa
NIM : 89340665
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Kekuasaan Politik dalam Islam Perspektif Sunnah dan
Syi'ah.

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat diajukan ke
sidang munaqasah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya.

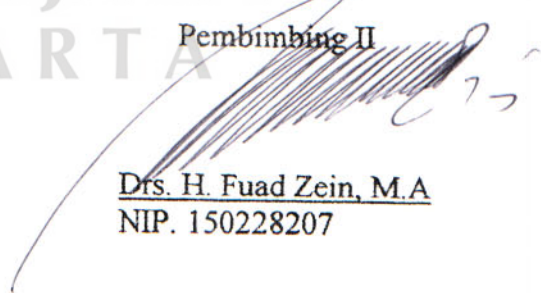
Demikian, semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Rabi'ul Awwal 1417 H
18 Juli 1997 M

Pembimbing II


Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP. 150228207

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

KEKUASAAN POLITIK DALAM ISLAM
PERSPEKTIF SUNNAH DAN SYI'AH

Yang disusun oleh:

MUSOFFA

NIM. 89340665

Telah dimunagasahkan di depan sidang munagasah pada tanggal 16 Agustus 1997/12 Rabi'ul Akhir 1417 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 5 Rabi'ul Akhir 1419 H
28 Juli 1998 M

DEKAN
Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid

NIP: 150 071 105

Panitia Munagasah

Ketua Sidang

Drs. H. A. Malik Madani, MA.

NIP: 150 182 698

Pembimbing I

Drs. H. Zarkasyi Abdul Salam

NIP: 150 046 306

Penguji I

Drs. H. Abdul Salam Arief, MA.

NIP: 150 216 531

Sekretaris Sidang

Drs. Makhrus

NIP: 150 260 055

Pembimbing II

Drs. H. Fuad Zein, MA.

NIP: 150 228 207

Penguji II

Drs. Hamim Ilyas

NIP: 150 235 955

PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Kepada Para Pemikir Bebas
Intelektual Tercerahkan
dan Manusia-manusia yang Selalu Kritis
Memandang Sejarah

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab Latin yang pakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 158 th. 1987 No. 0543 b/u/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

أ : tidak dilambangkan	ز : z	ق : q
ب : b	س : s	ك : k
ت : t	ش : sy	ل : l
ث : ś	ص : ś	م : m
ج : j	ض : d	ن : n
ح : ḥ	ط : ṭ	و : w
خ : kh	ظ : ḏ	ه : h
د : d	ع : ʿ	ء : ʾ
ذ : ḏ	غ : g	ي : y
ر : r	ف : f	

2. Vokal Tunggal

ا : a	contoh :	كَتَبَ : kataba
إ : I	contoh :	ذَكَرَ : ḏukira
و : u	contoh :	فَعِلَ : fu'ila

3. Vokal Rangkap

أَي ... : ai	contoh :	كَيْفَ : kaifa
أَوْ ... : au	contoh :	حَوْلَ : ḥaula

4. Vokal panjang

آ : a	contoh :	قَالَ : qāla
إِ : i	contoh :	قِيلَ : qīla
: u	contoh :	يَقُولُ : yaqūlu

5. Ta' marbutah, ditransliterasikan dengan /h/ atau /t/

Contoh المدينة المنورة : al-Madīnah al-Munawwarah
al-Madīnatul Munawwarah

6. Syaddah (Tasydid) dengan konsonan rangkap

Contoh : رَبَّنَا : Rabbanā

7. Hamzah bila diletakkan di tengah dan diakhir dilambangkan dengan apostrop ('), tetapi bila terdapat di awal kata tdak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab berupa alif

Contoh : تَأْخُذُونَ : ta'khuḏūna
أُمِرْتُ : umirtu
النَّوْءُ : an-nau'

B. Kata sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الشَّمْسُ : Asy-syamsu

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan aturan yang digunakan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh : الْحَمْدُ : Al-Hamdu

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, para keluarga dan para sahabat karibnya.

Harus penyusun akui, bahwa penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik yang bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, ucapan terima kasih pantas penyusun sampaikan kepada Bapak Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid, selaku Dekan Fakultas Syari'ah. Begitu juga kepada Bapak Drs. H. Zarkasyi Abdul Salam dan Drs. H. Fuad Zein, M.A, selaku pembimbing dalam penelitian ini. Kepada beliau berdua tidak lupa penyusun ucapkan banyak terima kasih. Kepada teman-teman *LKIS* (Lembaga Kajian Islam dan Sosial) dan teman-teman *LePAS* (Lembaga Pengkajian Agama dan Sosial), agaknya juga sudah sewajarnya penyusun sampaikan ucapan terima kasih. Sebab, dari diskusi-diskusi ringan, maupun kritik-kritik yang mereka lontarkan, ternyata memberikan andil besar bagi terealisirnya penelitian ini. Dan kepada teman-teman yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu-persatu, penyusun hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan.

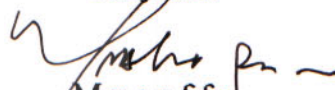
Sebagai karya awal, penelitian ini tentu masih sangat jauh dari sempurna, lantaran di dalamnya belum mampu memberikan jawaban memuaskan dari sejumlah persoalan yang muncul. Ibarat obat, penelitian ini tidak lebih dari

sekedar “obat perangsang”, yang diharapkan akan memberikan gairah kepada peneliti-peneliti lainnya untuk melanjutkan proyek yang tidak ringan ini.

Atas segala kekurangan yang dijumpai, penyusun tetap terbuka untuk menerima kritik dan saran dari pihak manapun, sepanjang hal itu tetap proporsional dan justru dapat memperkaya khasanah pemikiran dalam penelitian ini. Akhirnya, kepada Allah-lah segalanya penyusun kembalikan. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 15 Juli 1997

Penyusun


Musoffa
Nim. 89340665



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	19
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II : KEKUASAAN POLITIK	
A. Kekuasaan	32
1. Pengertian Kekuasaan	32
2. Kedaulatan	39
a. Teori Kedaulatan Tuhan	41
b. Teori Kedaulatan Rakyat	43
c. Teori Kedaulatan Raja	44
3. Pembagian Kekuasaan	45

B. Politik	50
1. Pengertian Politik	50
2. Ideologi	58
3. Konstitusi	61
C. Kekuasaan Politik	64
 BAB III : DOKTRIN POLITIK AHLUS SUNNAH WAL JAMĀ`AH	
A. Pengertian Ahlus Sunnah Wal Jamā`ah ...	66
B. Sejarah Perkembangan Ahlus Sunnah Wal Jamā`ah	80
C. Doktrin Politik Ahlus Sunnah Wal Jamā`ah	91
1. Khilāfah	91
2. Ijama`	99
3. Bai`ah	105
 BAB IV : DOKTRIN POLITIK SYI`AH IMĀMIYAH	
A. Pengertian Syi`ah Imāmiyah	114
B. Sejarah Perkembangan Syi`ah Imāmiyah ..	118
C. Doktrin Politik Syi`ah Imāmiyah	129
1. Imamah	129
2. Wilāyah	137
3. Ismah	152
 BAB V : KONSEP KEKUASAAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF DOKTRIN POLITIK AHLUS SUNNAH WAL JAMĀ`AH DAN SYI`AH IMĀMIYAH	
A. Rumusan Konseptual	157
1. Sumber Kekuasaan Politik	157

2. Bentuk Suksesi	163
3. Proses Legitimasi	187
4. Pola Hubungan Penguasa Dengan Rakyat	192
5. Batas-Batas Kekuasaan	197
6. Aspek Keadilan Dalam Kekuasaan	205
B. Rumusan Praktis	212
1. Kekuasaan Islam Saudi Arabia	213
2. Kekuasaan Islam Libya	219
3. Kekuasaan Islam Iran	223

BAB VI : P E N U T U P

A. Kesimpulan	227
B. Saran-Saran	230

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam ilmu politik terdapat beberapa konsep.¹⁾ Di antara konsep-konsep itu, konsep kekuasaan dan konsep negara merupakan dua konsep yang paling penting.²⁾ Membicarakan kedua konsep itu berarti kita memasuki wilayah pembahasan inti dari ilmu politik.

Dilihat dari konteks kesejarahan, menunjukkan bahwa konsep negara merupakan konsep yang paling dominan. Sehingga membicarakan ilmu politik berarti membicarakan negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.³⁾ Di dalam membicarakan konsep negara misalnya, sebagaimana dikemukakan oleh Ekstein, akan dibicarakan masalah pemerintahan lokal, partai politik, kelompok penekan dan pendapat umum.⁴⁾

1) Miriam Budiardjo membagi konsep politik dalam empat kategori, yaitu: *teori politik, masyarakat, kekuasaan dan negara*. Lihat, Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 30.

2) A. Rahman Zaenuddin, *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 1.

3) Max Boli Sabon, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 7.

4) Rahman Zaenuddin, *Kekuasaan.*, hlm. 5.

Akan tetapi, setelah kurun waktu sekitar berakhirnya perang dunia II, **aksentuasi** pembahasan dalam ilmu politik telah mengalami pergeseran. Jika pada mulanya konsep negara merupakan konsep terpenting dalam ilmu politik, maka saat ini justru sebaliknya. Konsep kekuasaan telah mengalami kemajuan dan diakui sebagai konsep terpenting dalam ilmu politik.⁵⁾

Negara itu pada dasarnya tidak lebih dari wadah atau kulit luar saja, dan bukan inti atau pokok permasalahan yang sesungguhnya dalam ilmu politik. Para pendukung konsep kekuasaan menyebutkan bahwa inti yang lebih penting dan sangat menentukan adalah konsep kekuasaan. Masalah ilmu politik yang sesungguhnya adalah, bagaimana mempertahankan serta mengembangkan kekuasaan.⁶⁾ Oleh karena itu, menempatkan konsep negara pada posisi sentral dalam ilmu politik, berarti memusatkan perhatian politik pada kulit luar dan bentuk formalnya belaka, dan secara tidak disadari telah mengabaikan inti permasalahan politik yang lebih fundamental.

Terlepas dari pro dan kontra mengenai pemakaian konsep kekuasaan sebagai konsep pokok dalam ilmu politik, kenyataan menunjukkan bahwa konsep kekuasaan memang besar peranannya dalam pembahasan ilmu politik. Bahkan boleh dikatakan, bahwa penggunaan konsep tersebut telah mampu

5) *Ibid.*, hlm. 4.

6) *Ibid.*, hlm. 5.

membuka wawasan baru akan makna politik itu sendiri. Dalam hubungan ini, bisa dilihat betapa dominannya pemikiran-pemikiran yang berkembang, bahwa politik adalah perjuangan memperoleh, teknik menjalankan, pelaksanaan, dan pengawasan kekuasaan, atau menyangkut masalah pembentukan dan penggunaan kekuasaan.⁷⁾

Bertitik tolak dari cara pandang di atas, dapatlah dikemukakan bahwa pembahasan dalam bidang politik dewasa ini telah mengalami perubahan cukup mendasar, dari konsep negara menjadi konsep kekuasaan.

Bertrand Russel, dalam salah satu karyanya secara meyakinkan membuktikan kebenaran asumsi di atas. Dia menyatakan bahwa konsep mendasar dalam ilmu sosial, adalah kekuasaan, sebagaimana halnya energi yang merupakan konsep dasar dalam ilmu fisika.⁸⁾

Dorongan untuk berkuasa, pada dasarnya merupakan kodrat manusia.⁹⁾ Apabila dorongan semacam itu tidak terkendali, maka ditempuhlah berbagai macam cara untuk meraihnya. Dan manakala kekuasaan yang diimpikan itu telah berada dalam genggamannya, keinginan yang muncul berikutnya adalah, bagaimana mempertahankan kekuasaan agar

⁷⁾Cheppy Hericahyono. *Ilmu Politik Dalam Perspektif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 163.

⁸⁾Bertrand Russel, *Kekuasaan: Sebuah Analisa Sosial Baru*, alih bahasa Hasan Basri, (Jakarta: Yayasan Obor, 1988), hlm. 4.

⁹⁾Erlangga Masdiana, "Ilmu Pengetahuan dan Kekuasaan", *Kompas*, edisi 15 April 1996, hlm. 4.

tidak jatuh ke tangan orang lain. Hal inilah yang biasanya membawa kekuasaan jatuh pada "*despotisme politik*".

Lord Acton pernah menyatakan bahwa "kekuasaan cenderung korup" (*the power tends to corrupt*).¹⁰⁾ Sehingga cara-cara yang dilakukan seringkali mencerminkan perilaku yang tidak *fair* dan tidak legal.

Realitas semacam inilah yang pada gilirannya mengilhami munculnya gagasan untuk mengkaitkan kekuasaan dengan etika.¹¹⁾ Sebab, di samping manusia mempunyai naluri untuk berkuasa, mereka juga makhluk sosial yang mempunyai toleransi, hasrat saling menolong dan perasaan cinta kasih terhadap sesama umat manusia.

Dalam wacana politik, gagasan untuk menjadikan kekuasaan agar tidak menyimpang, oleh para pakar politik diwujudkan dalam bentuk yang membagi (membatasi) kekuasaan dalam berbagai kategori.¹²⁾ Bahkan untuk menjamin bahwa masing-masing kekuasaan tidak akan melampaui batas kekuasaan lainnya, dipandang perlu menerapkan sistem

10) *Ibid.*

11) Menurut Russel, agar kekuasaan tidak terperosok ke jurang "kejahatan politik", maka ia harus selalu dikaitkan dengan sesuatu tujuan. Kekuasaan bukan dijadikan tujuan final, melainkan hanya sebagai sarana mencapai tujuan kemaslahatan. Cinta kekuasaan, kata Russel, tidaklah jelek. Tapi yang paling baik adalah etika yang membenci kekuasaan -- lebih dari apa yang dibenarkan akal budi. Lihat Russel, *Kekuasaan.*, hlm. 205.

12) Misalnya, John Locke (1632-1704) membagi kekuasaan dalam tiga kategori: legislatif, eksekutif dan federatif. Kemudian Montesquieu (1689-1755) mengembangkan pemikiran Locke menjadi: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar.*, hlm. 151-152.

"*cheks and balancs*" (pengawasan dan pengimbangan), di mana setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya.¹³⁾

Secara konseptual, rumusan semacam itu lebih dikenal dengan istilah "demokrasi". Demokrasi, hingga saat ini masih dipandang sebagai bentuk final dari sistem politik (kekuasaan) yang paling ideal. Akan tetapi, sejalan dengan evolusi perkembangan manusia, sistem demokrasi mulai digugat dan dipertanyakan relevansinya.¹⁴⁾ Demokrasi, memang memiliki banyak kelebihan dibanding dengan sistem kekuasaan mana pun. Namun, kelebihan-kelebihan itu bersifat negatif; ia memang dapat mencegah keburukan-keburukan tertentu, tetapi tidak menjamin adanya pemerintahan yang baik.¹⁵⁾ Sehingga kekuasaan yang didasarkan pada sistem demokrasi belum sepenuhnya dapat menjamin penguasa berbuat adil, jujur dan berorientasi pada kepentingan rakyat.¹⁶⁾

Kenyataan seperti itulah yang kemudian mendorong para pakar politik untuk mengembangkan konsep kekuasaan sesuai dengan tuntutan-tuntutan kontemporer masyarakat. Fenomena ini sekaligus menunjukkan bahwa pembahasan seputar konsep

¹³⁾ *Ibid.*, hlm. 153.

¹⁴⁾ Kritik terhadap sistem demokrasi, lihat misalnya, Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, I, II, alih bahasa. A. Rahman Zaenuddin, (Jakarta: Yayasan Obor, 1992).

¹⁵⁾ Russel, *Kekuasaan.*, hlm. 212.

¹⁶⁾ Masdiana, *Ilmu.*, hlm. 4.

kekuasaan di dunia modern menjadi sangat urgen, menemukan titik relevansinya dan selalu aktual.

Berangkat dari pemikiran seperti diuraikan di atas, penyusun terdorong untuk meneliti sejauhmana ide-ide dasar mengenai kekuasaan politik yang terdapat dalam doktrin politik Sunnah (Ahlus Sunnah wal Jama'ah) dan Syi'ah Imamiyah.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa sejak pertama, misi keagamaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ditujukan kepada "qaum" atau "ummah", suatu lembaga politik yang modelnya lebih dikenal oleh orang-orang Arab.¹⁷⁾ Islam, sejak awal mulanya telah memiliki relevansi dengan organisasi sosial dan politik di masyarakat.¹⁸⁾ Kepemimpinan negara dalam Islam (*imamat*), adalah dimaksudkan untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur urusan dunia.¹⁹⁾

Sejarah mencatat, bahwa hari-hari pertama setelah wafatnya Nabi SAW, persoalan yang timbul adalah persoalan kekuasaan, yakni menyangkut siapa sosok figur yang paling pantas menggantikan kepemimpinan Nabi. Meskipun masalah itu untuk sementara waktu berhasil diselesaikan dengan

17) W. Montgomery Watt, *Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah* alih bahasa. Helmi Ali, (Jakarta: P3M, 1988), hlm. 42.

18) *Ibid.*, hlm. 43.

19) Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bisry al-Mawardi, *al-Ahkām as-Sultāniyyah*, (ttp.: Mustfa al-Babi al-Halabi wa-Aūladuhu, 1973), hlm. 5.

diangkatnya Abu Bakar sebagai khalifah, akan tetapi hal itu oleh sebagian kelompok dipandang masih menyisakan sejumlah agenda persoalan, yang hingga saat ini masih diperselisihkan.²⁰⁾

Reaksi keras segera dimunculkan oleh para pendukung Ali yang mengklaim bahwa masalah kepemimpinan adalah hak mutlak *ahlul-bait*. Ali, beserta sebelas keturunannya diyakini oleh pendukungnya telah menerima "wasiat" langsung dari Nabi SAW menyangkut masalah tersebut.²¹⁾

Ketika Ali memegang tampuk kekuasaan menggantikan Uṣman, persoalan kekuasaan muncul kembali. Mu'awiyah ibn Abi Sufyan, salah seorang gubernur Damascus pada masa Uṣman, menggugat keabsahan kepemimpinan Ali dan melontarkan tuduhan bahwa Ali adalah orang yang paling bertanggung jawab atas tumpahnya darah Uṣman.²²⁾ Perselisihan tersebut terus berlangsung sampai terbunuhnya khalifah Ali ditangan ekstrimis Abudurrahman ibn Muljam pada tahun 40 H.

Tampilnya Mu'awiyah di pentas kekuasaan, bukan hanya berarti perubahan sistem pemerintahan, melainkan juga merupakan penerapan kembali tradisi "jahiliyah" dalam

²⁰⁾ Abdul Muta'ali as-Sya'idi, *as-Siyāsah al-Islāmiyah fi 'Ahdi al-Khulāfā ar-Rāsyidīn*, (ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1962), hlm. 22-23.

²¹⁾ Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni-Syi'ah*, alih bahasa. Asep Hikmat, (Bandung: Pustaka, 1988), hlm. 6-7.

²²⁾ Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, alih bahasa. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1988), hlm. 159.

masyarakat Islam dan menandai babak akhir sistem pemerintahan Islam "demokratis" yang pernah dilestarikan oleh para al-Khulafā' ar-Rāsyidūn.²³⁾

Disisi lain, pengkhianatan Mu'awiyah terhadap isi perjanjian yang telah disepakatinya dengan pihak Hasan ibn Ali, juga pecahnya tragedi Karbela yang merenggut nyawa Husein ibn Ali cucu Rasulullah SAW beserta keluarganya,²⁴⁾ agaknya telah menciptakan fanatisme yang kuat serta menjadi medium yang cukup efektif bagi para pendukung Ali untuk melakukan konsolidasi politik dan membangun identitas Syi'isme.

Peristiwa sejarah di atas, pada gilirannya membelah umat Islam dalam tiga kelompok besar, yaitu kelompok yang mengakui kepemimpinan sebelum Ali, dan mengabsahkan kepemimpinan Mu'awiyah, yang kemudian dikenal dengan sebutan golongan Sunni (Ahlu Sunnah wal Jama'ah), kelompok yang tidak mengakui hasil yang dicapai di Saqifah, dan tidak menerima kepemimpinan Mu'awiyah, serta hanya mengakui kepemimpinan Ali, yang kemudian dikenal dengan sebutan golongan Syi'i, dan kelompok yang tidak mengakui kepemimpinan Ali maupun Mu'awiyah yang kemudian dikenal dengan sebutan golongan Khawarij.

²³⁾ *Ibid.*, hlm. 160-162.

²⁴⁾ Sayyid Muhammad Husein Jafri, *Dari Saqifah sampai Imamah*, alih bahasa. Meth Kiereha, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 240.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana dikemukakan di atas, penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai konsep kekuasaan politik yang terdapat dalam doktrin politik Sunni dan doktrin politik Syi'i.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas, beberapa pertanyaan yang cukup menggoda adalah: sejauhmana ide-ide konsep kekuasaan politik yang terdapat dalam doktrin politik Sunni dan doktri politik Syi'i? Adakah persamaan dan perbedaan dalam doktrin politik kedua faham keagamaan tersebut mengenai konsep kekuasaan politik? Adakah implikasinya konsep-konsep tersebut dalam praktik politik di negara-negara Islam modern? Tiga pertanyaan ini, yang sekaligus sebagai landasar pokok masalah, secara luas akan dijawab dalam skripsi ini.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam kajian ini adalah untuk menjelaskan lebih jauh mengenai konsep kekuasaan politik yang terdapat dalam doktrin politik Sunni dan doktrin politik Syi'i. Di samping itu, untuk menjelaskan adanya persamaan dan perbedaan mengenai konsep kekuasaan politik yang terdapat dalam doktrin politik Sunni dan doktrin politik Syi'i.

2. Kegunaan

Kajian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan dalam bidang fiqh siyasah pada khususnya, sebagai salah satu disiplin ilmu yang diajarkan di jurusan Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Realitas politik, yang pernah ditorehkan oleh kaum muslimin dalam sejarah Islam paling awal, telah menjadi fenomena menarik abad ini yang banyak menyita perhatian para ulama dan cendekiawan muslim untuk memberikan catatan-catatan kritis dan kajian yang mendalam di seputar masalah tersebut.

Sepanjang sejarah peradaban Islam, harus diakui, dogma-dogma politik, memang tampak lebih mendominasi dan banyak mewarnai perkembangan-perkembangan pemikiran di luar aspek politik. perkembangan-perkembangan apapun yang muncul, selalu mempunyai korelasi dengan motif-motif politik. Kecenderungan yang terjadi, dalam banyak hal mampu memberikan rangsangan bagi penulis-penulis Muslim untuk menuangkan gagasan-gagasan politik sesuai dengan dogma keagamaan yang dipeluknya. Hubungan yang tumpang-tindih memang tak terhindarkan; di satu sisi motif keagamaan yang nampak sebagai perangsangnya, namun di sisi lain justru motif politik-lah yang telah membesarkan pemikiran-pemikiran keagamaan di luar aspek politik tersebut.

Apapun asumsi yang muncul, adalah suatu kenyataan bahwa persoalan yang muncul setelah wafatnya Nabi SAW, tiada lain adalah persoalan politik, yakni menyangkut siapa sosok figur yang dianggap paling pantas menduduki jabatan khalifah pengganti Nabi SAW. Bahkan, jika kita merujuk pada satu pendapat yang menyebutkan bahwa tonggak utama politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan, maka sulit sekali mencari pandangan dunia yang lebih politis ketimbang Islam. Dengan pandangan bahwa watak manusia memiliki kebutuhan fisik di samping kebutuhan spiritual, Islam tidak pernah puas dengan hanya menjelaskan cita-citanya saja, tapi terus berusaha mencari sarana untuk menerapkannya, dan kekuasaan dipandang sebagai sarana paling efektif untuk sampai pada cita-cita tersebut. Itulah sebabnya, logis belaka jika pemikir Barat semacam Watt menyebut bahwa misi keagamaan yang disampaikan oleh Muhammad SAW selalu memiliki relevansi dengan organisasi sosial dan politik di masyarakat.²⁵⁾

Ini semua hanyalah sekedar unsur potensial saja dari politisasi pemikiran Muslim, dan yang secara logis telah mencetak seorang Muslim sebagai makhluk politik yang paling keras. Penelusuran atas berbagai pemikiran politik Muslimin, dalam banyak hal, dapat dijadikan sebagai petunjuk-petunjuk paling mumpuni, guna mendapatkan ilustrasi yang transparan terhadap perkembangan-

²⁵⁾Watt, *Politik.*, hlm. 45.

perkembangan maupun kecenderungan-kecenderungan politik dalam arus pemikiran politik kaum Muslimin. Nyata sekali, bahwa pemikiran-pemikiran maupun gagasan-gagasan politik para ulama dan cendekiawan Muslim memperlihatkan sorot analisis yang berbeda. Perbedaan ini, secara lahiriah dapat dijelaskan melalui adanya perbedaan dogma politik. Namun, kecenderungan untuk menyesuaikan diri dengan realitas politik pada zaman di mana mereka hidup, sedikit banyak juga telah menjadi kekuatan cukup potensial bagi lahirnya pemikiran yang dimunculkan. Oleh karena itu, penelusuran atas berbagai karya mereka, mau tidak mau menuntut adanya kejelian dan keseriusan yang lebih ekstra, agar paradoksi-paradoksi yang kemungkinan besar ditemui, secara ketat dapat dibatasi, atau sedapat mungkin dihindari. Rangkuman atas karya-karya yang dipandang berhubungan dengan kajian ini, dapat dijelaskan berikut ini.

Salah satu karya ulama Sunni yang cukup penting dalam kajian ini adalah karya yang ditulis Abdurrahman ibn Khaldun, yang berjudul *Muqaddimah ibn Khaldun*.²⁶⁾ Apa yang menarik dalam buku tersebut adalah, dengan penghampiran sosiologis, Ibn Khaldun mampu menunjukkan berbagai peristiwa sejarah dalam wacana politik Islam, yang kadang-kadang menamp[akkan karakter yang tidak konsisten itu, dengan logika-logika politik yang mudah dicerna dan dapat

²⁶⁾Lihat, Abdurrahman ibn Khaldun, *Muqaddimah ibn Khaldun*, (ttp.: Dar-al-Fikr, tt).

diterima secara rasional. Atau dengan kata lain, perubahan-perubahan yang terjadi, atau lebih tepatnya penyesuaian-penyesuaian yang "terpaksa" dilakukan, yang terkadang nampak kontradiktif dengan doktrin dasarnya, secara rasional dijelaskan oleh Ibn Khaldun melalui interpretasi-interpretasi sosiologis.

Apa yang menarik dari pandangan Ibn Khaldun adalah, bahwa penerapan dari sistem politik (kekuasaan) dalam Islam, bukan sesuatu yang bersifat statis dan anti perubahan. Sama halnya dengan fenomena-fenomena lain, doktrin politik Islam juga merupakan subjek situasi yang sarat dengan kontekstualisasi dan dinamika.

Sama halnya dengan Ibn Khaldun, ulama Sunni berma'hab Hanbali, Ibn Taimiyah, juga memperlihatkan karakter berpikir yang tidak jauh berbeda dengan Ibn Khaldun. Melalui karyanya yang berjudul *as-Siyāṣah asy-Syar'īyyah fī Islāhi ar-Rā'iy wa ar-Ra'īyyah*,²⁷⁾ Ibnu Taimiyah nampak sebagai pemikir yang sangat *realis*. Meskipun pemikiran yang ia munculkan dalam banyak kasus seringkali berbenturan dengan kebijakan penguasa, namun satu hal yang nampak kental dalam pemikirannya, yakni titik berat perhatiannya pada upaya untuk menjaga stabilitas dan keamanan ketimbang apapun bentuk idealisme politik. Salah satu riwayat yang disitirnya, bahwa "enam puluh tahun di

²⁷⁾ Taqiyyuddin Ibnu Taimiyah, *as-Siyāṣah as-Syar'īyyah fī Islāhi ar-Rā'iy wa ar-Ra'īyyah*, (Mesir.: Dar al-Kitab al-"arabi, 1969).

bawah penguasa zalim masih lebih baik ketimbang semalam tanpa penguasa", merupakan bukti nyata adanya kecenderungan pemikiran Ibn Taimiyah sebagaimana disebutkan di atas.

Gagasan-gagasan politik yang dipaparkan Khaldun dan Ibn Taimiyah, tak pelak lagi, dalam wacana Sunnisme menunjukkan adanya sikap lentur yang begitu mudah beradaptasi dengan realitas politik yang sedang berlangsung. Di satu sisi, ini memang dapat memberikan sumbangan positif, karena dengan begitu doktrin-doktrin Sunni lebih mudah untuk bertahan di tenagah gelombang kekuasaan yang despotik.

Tapi di kalangan pemikir-pemikir Sunni yang datang lebih kemudian, "*kolaborasi-kolaborasi*" semacam itu justru dikecam, karena hanya akan memperpanjang "duka" dan "nestapa" yang dirasakan rakyat. Berapapun harga yang harus dibayar, idealisme politik agaknya memang harus tetap ditegakkan, daripada harus mempertaruhkannya dengan "oportunisme-oportunisme" politik. Oleh karena itu, kritik sejarah dalam kasus seperti ini menjadi keniscayaan.

Salah seorang cendekiawan muslim yang memiliki karakter berpikir semacam ini, salah satunya adalah Abul A'la al-Maududi. Dalam bukunya yang berjudul: *Khilafah dan Kerajaan*,²⁸⁾ al-Maududi tampil ke depan sebagai sosok pemikir Sunni yang kritis, jujur dan objektif. Pandangan-

²⁸⁾ Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, alih bahasa. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1993).

pandangannya mengenai reputasi politik periode al-Khulafā'ar-Rāsyidūn sangat jauh dari prasangka-prasangka sentimental kemaḏhaban, begitu juga koreksi-koreksi atas praktik politik periode Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyyah, acapkali mencengangkan dan banyak pengkaji tersentak kaget.

Meskipun gagasan yang mereka rumuskan seringkali berbeda, namun keseluruhan gagasan tersebut tetap muncul dari "etos" yang sama, yakni upaya mempertahankan supremasi *syura* (musyawarah) dan *ijma'* (konsensus), serta menolak segala bentuk pemikiran yang menempatkan "kelompok" tertentu saja yang dipandang paling berhak atas kepemimpinan.

Berbeda dengan pandangan di atas, salah satu kelompok kaum muslimin, yang ternyata merupakan kelompok minoritas kaum muslimin, justru berkeyakinan bahwa sebenarnya Nabi SAW telah "menunjuk" calon penggantinya, dan calon tersebut adalah menantu dan keponakannya, Ali. Pandangan ini sekaligus menolak sistem *syura* dan *ijma'*, yang pernah dipraktikkan oleh para sahabat di Saqifah Bani Sa'adah.

Penelusuran atas karya ulama-ulama Syi'i dalam aspek politik, secara ringkas dapat dilihat berikut ini:

Salah satu karya ulama Syi'i yang cukup membantu dalam kajian ini adalah, karya Murṭaḏa Muṭahhari, yang berjudul:

Imamah dan Khilafah.²⁹⁾ Sebagai seorang Syi'i yang cukup mumpuni, Muṭahhari memberikan uraian yang sangat mendalam dan kritis seputar masalah imamah. Paparannya juga mampu menyentuh ruh paling mendasar dari konsep imamah. Tak pelak lagi, buku ini termasuk salah satu karya yang paling komprehensif terhadap masalah yang dikajinya. Muṭahhari bukan hanya berangkat dari teks-teks keagamaan belaka, melainkan bagaimana teks-teks tersebut ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga rasanya sulit ditolak oleh siapapun yang mengkajinya.

Karya Muṭahhari itu, dalam banyak segi memiliki kesamaan dengan buku yang ditulis oleh Ali Syari'ati, mentor radikal Islam Syi'ah, yang berjudul: *Ummah dan Imamah*.³⁰⁾ Yang membedakannya barangkali terletak pada ulasan Syari'ati yang meliputi aspek ummah (umat). Apa yang menarik dari ulasan Syari'ati dalam buku ini adalah, upaya yang ia lakukan untuk mensintesis teori syura dalam tradisi Sunnisme dan wasiat dalam doktrin Syi'isme, dalam hal pengangkatan pemimpin. Inilah rupanya yang mendatangkan julukan baginya; *crypto-Sunni*. Mengenai hal ini, Syari'ati berargumentasi bahwa ada saatnya ketika umat manusia belum mencapai kematangan, pemimpin mesti merupakan penunjukan berdasarkan bimbingan Ilahi. Dalam

²⁹⁾ Murtaza Muṭahhari, *Imamah dan Khilafah*, alih bahasa. Satrio Pinandito, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991).

³⁰⁾ Ali Syari'ati, *Ummah dan Imamah*, alih bahasa. Afif Muhammad, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1995).

hal ini, yang berlaku adalah formula Syi'i mengenai penunjukan imam. Baru ketika kematangan sudah dicapai, tiba saatnya bagi masyarakat untuk siap memilih imam-nya berdasarkan musyawarah, sebagaimana yang sudah selayaknya berlaku dalam abad ini.

Jika karya Mutahhari dan Syari'ati lebih dilatarbelakangi oleh tinjauan sosiologis, maka ada satu karya lain yang lebih banyak melakukan penjabaran lewat analisis-analisis tekstual, berjudul: *Dialog Sunnah-Syi'ah*,³¹⁾ ditulis oleh A. Syarafuddin al-Musawi. Buku ini merupakan dokumentasi surat-menyurat antara ulama Syi'ah berkebangsaan Lebanon, A. Syarafuddin al-Musawi, dengan seorang ulama Sunni, mantan rektor Universitas al-Azhar-Kairo, Syaikh Salim al-Bisyri al-Maliki.

Isi buku ini boleh dikatakan sangat multi-dimensional, karena hampir seluruh isu-isu penting perbedaan antara Sunni-Syi'i terekam secara komplit. Melalui surat yang ia tulis sebagai jawaban atas pertanyaan Syaikh Salim, al-Musawi telah menunjukkan dalil-dalil tekstual Syi'ah. Uraianannya yang mendalam, membuat buku ini layak dijadikan sebagai referensi utama dalam setiap penelitian apapun yang berhubungan dengan masalah Syi'isme.

Namun, untuk menghindari prasangka-prasangka duplikatif, agaknya perlu juga ditelaah dua buku yang

³¹⁾A. Syarafuddin al-Musawi, *Dialog Sunnah-Syi'ah*, alih bahasa. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1990).

secara sepintas nampak memiliki kesamaan dengan penelitian yang penyusun lakukan.

Buku pertama karya Hamid Enayat, yang berjudul: *Reaksi Politik Sunni-Syi'ah*.³²⁾ Sedang buku kedua ditulis oleh Mehdi Muzaffari, berjudul: *Kekuasaan Dalam Islam*.³³⁾ Jika buku pertama lebih banyak berbicara mengenai pemikiran politik dalam konteks abad modern, semisal demokrasi, sosialisme dan nasionalisme, maka buku kedua lebih difokuskan pada fenomena politik yang muncul di negara-negara Muslim. Misalnya, model kekuasaan Iran, Al-Jazair, Arab Saudi, dan seterusnya. Kendatipun dua buku tersebut juga membahas polemik antara Sunni-Syi'i, namun kajian yang dilakukan sangat umum sifatnya. Sedangkan spesifikasi pembahasan mengenai konsep kekuasaan politik, baru sebatas percikan pemikiran yang belum tersusun secara sistematis, dan oleh karenanya sangat jauh dari memadai. Dengan penjelasan ini, maka penelitian yang penyusun lakukan di sini benar-benar terhindar dari duplikasi (peniruan) karya tulis ilmiah, dan tetap terjaga orisinalitasnya.

³²⁾Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni-Syi'ah*, alih bahasa. Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1988).

³³⁾Mehdi Muzaffari, *Kekuasaan Dalam Islam*, alih bahasa. Abdurrahman Ahmed, (Bandung: Pustaka Panjimas, 1994).

E. Kerangka Teoritik

Sebagai landasan teoritik penting dijelaskan di sini hal-hal sebagai berikut:

Sebagaimana telah disinggung di awal tulisan ini, bahwa pembahasan dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh munculnya kontroversi seputar masalah; siapa sosok figur yang dipandang paling pantas menduduki jabatan khalifah setelah wafatnya Nabi SAW. Kenyataan menunjukkan bahwa Abu Bakarlah orang yang dipandang paling pantas menduduki jabatan tersebut, dan melalui musyawarah-mufakat antara kelompok Anṣar dan Muhajirin yang bertempat di Saqifah, Abu Bakar akhirnya terpilih sebagai khalifah pengganti Nabi.

Sementara di Saqifah telah terjadi konsensus memilih Abu Bakar, salah satu kelompok minoritas kaum Muslimin, yang ternyata mereka adalah para simpatisan Ali, menolak konsensus tersebut, dan meyakini sepenuhnya bahwa masalah kepemimpinan merupakan hak mutlak *ahlul-bait* (keluarga dekat Nabi).

Menurut kaum Syi'ah, penunjukan Nabi kepada Ali itu secara langsung telah diungkapkan Nabi ketika beliau bersama kaum Muslimin sedang dalam perjalanan pulang dari Haji Wada' (haji perpisahan), bertempat di *Gadir Khum*. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 28 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, 81 hari sebelum wafatnya Nabi SAW.

Di tempat yang bernama *Gadir Khum* inilah, turun ayat al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا
بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْزِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
34)

Ayat al-Qur'an yang oleh kaum Syi'ah disebut ayat *tablig* itu, menurut catatan at-Tabari yang diriwayatkan dari Zaid ibn Arqam, adalah berkenaan dengan Ali.³⁵⁾ Ayat tersebut juga merupakan perintah Allah kepada Nabi Saw agar segera menyampaikan (perintah-Nya) tentang penunjukan kepada Ali sebagai penggantinya kelak.³⁶⁾

Setelah turun ayat tersebut, dalam salah satu teks hadis yang diriwayatkan dari Bara' ibn 'Azib, sambil mengangkat tangan Ali beliau bersabda:

أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَِّّي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، قَالُوا بَلَىٰ،
قَالَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَِّّي أُولَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ قَالُوا بَلَىٰ،
فَقَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَىٰ مَوْلَاهُ، أَلَسْتُمْ وَالِ مِنْ وِلَاةِهِ وَعَادِ
مِنْ عَادَاهُ
37)

³⁴⁾ *Al-Ma'idah* (5): 67.

³⁵⁾ O. Hashem, *Saqifah: Awal Perselisihan Umat*, (Jakarta: Yapi, 1989), hlm. 223.

³⁶⁾ Mutahhari, *Imamah.*, hlm. 41.

³⁷⁾ Imam Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Maktabah al-Islami Dar as-Sawar, tt), IV: 281.

Setelah peristiwa itu, Umar ibn Khattab kemudian mendatangi Ali seraya berkata: "Alangkah bahagianya Anda wahai putra Abi Talib. Anda menjadi *maula* (pemimpin) setiap mukminin dan mukminat."³⁸⁾

Hadis kedua yang dijadikan dasar hukum oleh kaum Syi'ah adalah perintah agar kaum Muslimin mengikuti jejak *ahlul-bait*. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Sa'id al-Khudry Nabi bersabda:

كَأَنِّي دُعِيتُ فَأُجِبتُ، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ
مِنَ الْآخَرِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَعْرُوسٌ فَإِنْ ظُرِرُوا كَيْفَ تَخْلَفُونِي
فِيهِمَا، فَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْكَوْثَرِ ³⁹⁾

Begitu juga hadis yang menunjukkan kedudukan istimewa Ali di sisi Nabi Saw, yang diriwayatkan dari Amir ibn Sa'id ibn Abi Waqqas dari ayahnya sebagai berikut:

لَعَلَى أَنْتَ مَنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى الْإِيزَةِ لَأَنِّي بَعْدِي ⁴⁰⁾

Apa yang menarik dari hadis di atas adalah, bahwa Nabi Saw mengambil analogi antara Musa dan Harun.

³⁸⁾ *Ibid.*

³⁹⁾ *Ibid.*, III: 17 dan 26.

⁴⁰⁾ Abi al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj al-Qusairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (ttp: Dar al-Fikr li at-Taba'ah wa an-Nasr wa at-Tauzi', tt), bab, "Fadail as-Sahabat", II: 360.

Sebagaimana dikatakan oleh al-Musawi, bahwa yang paling menonjol dalam kedudukan Harun di sisi Musa adalah jabatannya sebagai *wazir* (menteri atau pembantu umum), yang menggantikan kepemimpinannya pada saat kepergian Musa, dan wajib ditaati oleh kaumnya.⁴¹⁾ Semua ini dapat dilihat berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

... واجعل لي وزيراً من اهلي، فهو اوتي، اشد به ائزري
واشركه في امري

42)

Adapun mengenai doktrin *'ismah* (kema'suman), ini dapat dilihat pada firman Allah sebagai berikut:

... ائما سيريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم
تطهيرا

43)

Menurut riwayat 'Umar ibn Abi Salamah, yakni anak tiri Rasulullah Saw, bahwa ayat itu turun kepada Nabi Saw, dan ketika itu beliau sedang berada di rumah Ummi Salamah. Setelah turun ayat tersebut, Nabi Saw kemudian memanggil Fatimah, Hasan dan Husein, kemudian menutupinya dengan kain, sedangkan Ali berada di belakang punggung Nabi, dan menutupinya dengan kain, kemudian beliau bersabda:

⁴¹⁾ Al-Musawi, *Dialog.*, hlm. 184.

⁴²⁾ *Tāha* (20): 29-32.

⁴³⁾ *Al-Ahzab* (22): 33.

اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي فَادْخُلْهُمْ الرَّجْسَ وَطَهِّرْ لَهُمُ تَطْهِيرًا

Ummi Salamah kemudian bertanya: "Dan aku bersama mereka ya Rasulullah?" Beliau menjawab: "Kamu tetap pada tempatmu, dan kamu selalu dalam kebaikan di sisiku."⁴⁴⁾

Berbeda dengan Syi'isme yang lebih menekankan sistem penunjukan dalam masalah kepemimpinan, Sunnisme justru memandang sebaliknya, rakyatlah yang lebih berhak untuk menentukan calon pemimpin. Konsensus para sahabat yang memilih Abu Bakar di Saqifah, merupakan dasar hukum paling kuat bagi kelompok Sunni. Al-Maududi menyatakan bahwa jika konsensus tersebut terjadi oleh seluruh umat, maka siapapun tidak berhak menolaknya, yang berarti pula, telah terjadi fakta hukum yang benar-benar otoritatif.⁴⁵⁾ Konsensus ini, oleh kelompok Sunni ditunjukkan dengan *bai'ah* rakyat kepada Abu Bakar, yang berarti telah terjadi persetujuan rakyat secara luas kepada kepemimpinan Abu Bakar.

Dalam tradisi politik Sunni, di samping *syura* dan *ijma'*, *bai'ah* juga memiliki peranan penting sebagai bentuk

⁴⁴⁾ Imam al-Hafiz Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Sirat at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, (ttp: Dar al-Fikr, 1978), bab, "Manaqib ahlul-bait Nabi", V: 328.

⁴⁵⁾ Abul A'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, alih bahasa. Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 112.

legitimasi rakyat kepada pemimpin terpilih. Dalam salah satu teks hadis yang diriwayatkan dari 'Amir ibn Rabi'ah dari ayahnya, Nabi Saw pernah bersabda:

46) من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Sa'id al-Khudry, Nabi juga bersabda:

47) إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

Hadis pertama lebih tertuju pada perlunya mengikatkan diri kepada seorang pemimpin, yang tercermin dalam bentuk *bai'ah*. Sedangkan hadis kedua lebih tertuju pada cita-cita menjaga stabilitas dengan tetap mempertahankan eksistensi pemimpin pertama.

Dengan pandangan-pandangan seperti itu, Sunnisme berkesimpulan bahwa dalam masalah kepemimpinan, Nabi Saw memang telah sengaja membiarkannya, dan tetap terbuka dengan menyerahkannya kepada umat untuk memutuskan siapa yang mereka anggap paling mampu mengemban tugas tersebut.

46) Muslim, *Sahih Muslim*, II: 136.

47) *Ibid.*, hlm. 137.

Jadi, jika istilah-istilah kunci doktrin politik Syi'ah adalah *imamah*, *wilayah* dan *'ismah*, maka untuk kaum Sunni adalah *khilafah*, *ijma'* dan *bai'ah*.⁴⁸⁾ Tentu saja, terjadinya hubungan yang tumpang-tindih tidak bisa dielakkan; kaum Sunni memakai gelar imam bagi khalifah, khususnya jika mereka mengacu pada fungsi-fungsi ruhaniah, dan kaum Syi'i menerima keabsahan *ijma'*, sepanjang hal itu tetap mencakup pendapat dari para imam yang ma'sūm.

Berdasarkan ketiga doktrin politik masing-masing antara Sunni dan Syi'i tersebut, yang sekaligus penyusun jadikan landasan teoritik dalam pembahasan skripsi ini, diharapkan maksud yang hendak dicapai dalam kajian ini dapat diwujudkan.

F. Metode Penelitian

Ada beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Dalam upaya untuk mendapatkan data atau informasi yang lengkap, jenis penelitian yang penyusun pergunakan adalah riset kepustakaan. Di sini, penyusun akan mengumpulkan buku-buku yang erat kaitannya dengan tema kajian yang penyusun lakukan. Sumber-sumber tulisan, dapat diambil dari para penulis Sunni dan Syi'i, maupun dari

⁴⁸⁾ Enayat, *Reaksi.*, hlm. 9.

para penulis lain yang relatif tidak memiliki sentimen-sentimen ideologis, sepanjang hal itu akan tetap membantu menjelaskan penelitian ini.

Di sini, faktor terpenting yang penyusun lakukan dalam riset kepustakaan adalah, menggali teori-teori yang pernah dikembangkan, mencari metode-metode serta teknik penelitian yang telah (pernah) digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, serta menghindari terjadinya duplikasi-duplikasi yang tidak diinginkan.⁴⁹⁾ Di samping itu, keinginan untuk mengetahui sampai sejauhmana tema (disiplin) ilmu yang penyusun teliti ini telah berkembang,⁵⁰⁾ juga merupakan pertimbangan utama dalam riset kepustakaan ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan di sini adalah deskriptif-analitik, yakni merumuskan data-data yang telah terkumpul itu dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis, sembari memberikan analisa-analisa kritis terhadap data yang telah terkumpul tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun pergunakan di sini adalah pendekatan "*tekstual*", yaitu suatu pendekatan yang

⁴⁹⁾ Moh. Nazir, ph.D, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1985), hlm. 111.

⁵⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 112.

menjadikan teks-teks agama sebagai salah satu dasar argumentasi yang paling meyakinkan, ketika ditemui perbedaan-perbedaan yang besar kemungkinan akan mencuat dalam penelitian ini.⁵¹⁾ Pendekatan tekstual dipandang memiliki kelebihan, karena ia akan mampu menghasilkan konsep yang lebih akurat dibanding dengan bentuk pendekatan lainnya. Hal itu disebabkan, bahwa kedua sumber hukum Islam, yakni al-Qur'ah dan al-Hadis, merupakan dua sumber hukum paling orisinil dan diyakini kebenarannya.⁵²⁾

Di samping menggunakan pendekatan tekstual, pendekatan "*sosiologi-fenomenologis*", agaknya juga merupakan langkah terpenting yang perlu diambil, agar argumen-argumen tekstual dapat diinterpretasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan motif-motif yang menggerakkan munculnya teks tersebut dapat diketahui. Pendekatan *sosiologis-fenomenologis* ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh filsuf terkenal Edmund Husserl dan Alferd Schultz. Pengaruh lainnya berasal dari Max Weber yang memberi tekanan pada *Verstehen*, yakni pemaknaan penafsiran terhadap pemahaman manusia.⁵³⁾ Di sini, yang menjadi fokus perhatian kaum fenomenologi adalah aspek subjektif orang,

51) Mehdi Muzaffari, *Kekuasaan.*, hlm. 6

52) Abdul Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik Dadalm al-Qur'an*, (Jakarta: LSIK, 1994), hlm. 24.

53) Dr. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 1993), hlm. 9

dan berusaha masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya, sehingga mengerti apa dan bagaimana maksud yang dikehendaki terhadap setiap pengertian yang dikembangkan oleh para subjek tersebut.⁵⁴⁾

4. Analisa Data

Setelah data-data yang terkumpul itu dideskripsikan, langkah berikutnya adalah menganalisisnya. Dalam analisa data ini, ada dua metode yang hendak dipergunakan:

a. Metode Deduktif

Yaitu suatu metode yang berangkat dari fakta-fakta umum, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.⁵⁵⁾ Relevansinya dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah, sumber-sumber tulisan dari berbagai pemikiran para tokoh kedua mazhab tersebut, selanjutnya akan ditarik generalisasi-generalisasi yang memiliki keterpaduan dengan doktrin dasarnya yang terdapat dalam doktrin politik Sunni dan doktrin politik Syi'i.

b. Metode Komparasi

Di sini, penyusun akan membandingkan pemikiran-pemikiran yang telah tergeneralisir itu antara paham Sunni dan Syi'i mengenai konsep kekuasaan politik. Jika

⁵⁴⁾ *Ibid.*

⁵⁵⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 42.

terdapat persamaan, di mana letak persamaannya, dan jika terdapat perbedaan di mana letak perbedaannya, serta motif-motif yang melatarbelakangi munculnya persamaan maupun perbedaan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Ada beberapa hal yang menjadi tema pembahasan dalam kajian ini, yang secara ringkas terangkum dalam sistematika sebagai berikut:

Penelitian ini dimulai dengan bab pertama, yakni pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan beberapa hal antara lain latar belakang masalah, suatu sub bab yang memberikan inspirasi bagi penyusunan skripsi ini. Setelah itu, rumusan pokok masalah, yang menjadi tema bahasan dalam kajian ini. Di samping hal-hal di atas, telaah pustaka juga coba diketengahkan, sebagai ikhtiar penyusun untuk menghindari prasangka-prasangka duplikatif dalam suatu kerja penelitian, di samping juga dalam rangka untuk mendapatkan gambaran yang mendalam, tentang sejauhmana kajian-kajian dalam skripsi ini telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Hal lain yang dibahas dalam bab ini adalah, kerangka teoritik, sebagai landasan pemecahan masalah dalam penelitian ini. Tidak dilupakan pula, adalah metodologi penelitian. Dengan metodologi, arah dan tujuan dalam penelitian ini benar-benar sesuai dengan target yang diharapkan.

Bab kedua membahas masalah yang berhubungan dengan tinjauan tentang kekuasaan politik. Dalam bab ini akan dibahas masalah kekuasaan dan politik. Bahasan mengenai kekuasaan meliputi pengertian kekuasaan, kedaulatan dan pembagian kekuasaan. Sedangkan bahasan mengenai politik meliputi pengertian politik, ideologi dan konstitusi. Setelah dibahas masing-masing istilah, kemudian akan diambil pengertian akhir tentang kekuasaan politik.

Bab ketiga membahas doktrin politik ahlu Sunnah wal Jama'ah yang meliputi pokok bahasan antara lain, pengertian ahlu sunnah wal jama'ah, sejarah perkembangan serta doktrin politiknya. Mengenai pokok bahasan doktrin politik, akan diulas tiga doktrin politik, yakni khilafah, ijma' dan bai'ah.

Adapun dalam bab yang keempat, akan dibahas doktrin politik Syi'ah Imāmiyah Isna 'Asy'āriyah, yang meliputi pokok bahasan antara lain, pengertian, sejarah perkembangan dan doktrin politiknya. Ada tiga doktrin politik Syi'ah yang akan dibahas di sini, yakni imamah, wilayah dan 'ismah.

Bab kelima merupakan bab analisa mengenai konsep kekuasaan politik yang terdapat dalam doktrin politik Sunni dan Syi'i. Dalam bab ini, dibahas antara lain, sumber kekuasaan politik, proses legitimasi, bentuk suksesi, batas-batas kekuasaan, pola hubungan penguasa-rakyat dan aspek keadilan dalam kekuasaan. Di samping itu,

juga akan dibahas praktik kekuasaan di Saudi Arabi, Libya dan Iran. Hal itu dimaksudkan untuk membuktikan bagaimana konsep kekuasaan politik dalam doktrin Sunni-Syi'i itu diterapkan.

Sedangkan pada bab keenam adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari serangkaian pembahasan dalam penelitian ini, dan saran-saran seperlunya guna pengembangan lebih lanjut terhadap penelitian ini.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penyusun uraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara garis besar, unsur-unsur yang terkandung dalam kekuasaan politik adalah meliputi: sumber kekuasaan, proses legitimasi, pemegang kekuasaan tertinggi, penyelenggaraan kekuasaan, lembaga penyelenggara kekuasaan, fungsi dan tugas kekuasaan, serta tujuan politik yang hendak dicapai.
2. Dalam doktrin politik Ahlus Sunnah Wal Jama'ah (Sunni), ada tiga doktrin politik, yaitu: *khilafah*, *ijma'* dan *bai'ah*. *Khilafah* adalah suatu jabatan yang berfungsi memimpin umat manusia sesuai dengan tuntunan Syari'ah. *Ijma'* adalah kesepakatan universal atau konsensus yang bersifat umum. *Ijma'* merupakan upaya kolektif yang melibatkan anggota-anggota suatu kelompok atau keseluruhan masyarakat untuk meraih suatu kebulatan pemikiran mengenai masalah tertentu. Sedangkan *bai'ah* adalah suatu akad perjanjian yang di dalamnya menyiratkan adanya hal-hal yang diperjanjikan. *Bai'at* melibatkan dua kelompok; di satu sisi pihak pemimpin dan di sisi lain pihak masyarakat. Dengan adanya *bai'at* rakyat kepada pemimpin, berarti telah terjadi fakta hukum terhadap kepemimpinan tersebut. Dengan demikian, taat kepada pemimpin menjadi suatu keharusan, sepanjang

pemimpin tersebut tidak menyimpang dari landasan hukum Tuhan.

3. Sebagaimana doktrin Sunni, dalam Syi'i juga ditemukan tiga doktrin politik, yaitu *imamah*, *wilayah* dan *'ismah*. Imamah adalah suatu jabatan kepala negara yang bertugas untuk melanjutkan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur urusan dunia. Dalam tradisi Syi'i, masalah imamah didasarkan pada sistem "penunjukan" sebagaimana yang dipraktikkan Nabi SAW kepada Ali ibn Abi Talib (dan kemudian dilanjutkan oleh sebelas keturunan Ali dari garis Fatimah). Adapun wilayah adalah suatu keyakinan di kalangan kaum Syi'i, bahwa masalah kepemimpinan sepeninggal Nabi SAW merupakan hak mutlak *ahlul-bait* (keluarga dekat Nabi). Pada titik ini, nampak sekali bahwa wilayah merupakan konsekuensi logis dari doktrin imamah. Dengan merujuk pada doktrin ini, maka kepemimpinan religius dan politik dipandang sebagai milik para imam saja. Dan yang terakhir adalah doktrin *'ismah*, yaitu suatu kepercayaan bahwa para imam yang berjumlah dua belas imam (dalam tradisi Syi'ah Imamiyah), adalah manusia-manusia pilihan Tuhan yang tak bercacat dan terbebas dari dosa.
4. Secara sederhana, perbedaan-perbedaan yang muncul antara Sunni dan Syi'i mengenai konsep kekuasaan politik, dapat dilacak dari adanya perbedaan mengenai doktrin politik, sebagaimana nampak dalam penjelasan di atas. Adanya perbedaan doktrin politik, pada gilirannya membentuk formulasi yang berbeda mengenai rumusan konsep kekuasaan politik.

5. Perbedaan-perbedaan itu, secara fundamental dipicu oleh kontroversi, sementara kaum Sunni berpandangan bahwa masalah kepemimpinan sepeninggal Nabi SAW mesti didasarkan pada sistem musyawarah-mufakat, karena persoalan tersebut memang sengaja dibiarkan oleh Rasulullah, dan diserahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menyelesaikannya, di sisi lain kaum Syi'ah justru berpandangan sebaliknya. Bagi kaum Syi'i, sebelum Nabi wafat, beliau sudah terlebih dulu menunjuk penggantinya, yaitu Ali. Menurut mereka, sangatlah tidak masuk akal dalam urusan yang sedemikian penting Nabi membiarkannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat. Padahal, sewaktu beliau masih hidup, dalam urusan sekecil apapun, jika beliau berhalangan, selalu menunjuk penggantinya. Misalnya, dalam urusan imam salat, menunjuk panglima perang, dan sebagainya.
6. Persamaan-persamaan yang dapat ditemukan di sini adalah, ketika wilayah (otoritas religius dan politik) dipegang para faqih. Sebab, sebagaimana diketahui, bahwa dalam kurun waktu gaib-nya Imam al-Mahdi sampai kedatangannya kembali, kepemimpinan dilanjutkan oleh para faqih, sebagai upaya untuk mengisi "kekosongan kepemimpinan" ketika Imam al-Mahdi dalam keadaan "gaib sempurna". Pada tahap ini, sistem penunjukan dinyatakan telah berakhir, dan sistem kepemimpinan melibatkan partisipasi aktif rakyat, yang berarti diterapkannya sistem *syura* dan *ijma'*, sebagaimana yang dipergunakan oleh kaum Sunni.

B. Saran-saran

Satu hal yang menjadi catatan penyusun, bahwa penelitian ini masih merupakan karya awal yang sudah barang tentu masih sangat jauh dari sempurna. Terbatasnya karya-karya rujukan terutama sumber-sumber Syi'ah, juga keterbatasan penyusun sendiri, merupakan persoalan yang turut memberikan andil besar bagi tidak tercapainya target maksimal penelitian ini.

Satu saran yang ingin penyusun ungkapkan di sini adalah, bahwa bagi mereka yang punya komitmen dalam bidang pemikiran politik Islam, alangkah baiknya penelitian yang dilakukan mencoba berangkat berdasarkan fenomena sosial dan kultural, jadi bukan semata-mata berdasarkan dogma-dogma agama belaka. Sebab sebagaimana terlihat, penelitian yang penyusun lakukan masih jauh dari harapan di atas.

Oleh karena itu beberapa rumusan tentang konsep kekuasaan politik dalam penelitian ini jelas masih jauh dari apa yang diharapkan. Dengan kata lain bahwa rumusan-rumusan pemikiran dalam kajian ini masih perlu dikembangkan lebih lanjut.

Akhirnya, segala kritik dan koreksi terhadap penelitian ini sangat penyusun harapkan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'ān dan Tafsir/Ulūm al-Qur'ān

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an. 1989.

Salim. Abdul Muin. *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam al-Qur'an*. Jakarta: LSIK, 1994.

Shihab. M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan. 1996.

Tabaṭaba'i. Sayyid Muhammad Husein. *Tafsir al-Mizan*. 20 jilid. Beirut: al-Matba'ah at-Tijāriyah Mu'assasah al-A'lamī lil Maṭbu'ah. 1971.

B. Al-Hadiṣ dan Ulūm al-Hadiṣ

Ahmad. Imam Ibn Hanbal. *Musnad Ahmad*. 6 jilid. Beirut: Maktabah al-Islāmi Dār as-Ṣawar. t.t.

Bukhāri. Abi Abdullah Muhammad ibn Isma'il. al-... *Saḥiḥ Bukhāri*. 4 jilid. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi. t.t.

Muslim. Abi al-Hasan ibn al-Hajjaj al-Kusairi an-Naisaburi. *Saḥiḥ Muslim*. 2 jilid. ttp.: Dār al-Fikr li at-Ṭaba'ah wa an-Naṣr wa at-Tauzi'. t.t.

Shiddiqi. T.M. Hasbi. as-... *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang. 1964.

Tirmidzi. Imam al-Hafiz Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Sirat. at-... *Sunan at-Tirmidzi*. 5 jilid. ttp.: Dār al-Fikr. 1978.

C. Fiqh dan Uṣūl Fiqh

Abdurrahman. Ramli Kabi'. *Bai'at: Suatu Prinsip Gerakan Islam*. alih bahasa. Saiful Ma'arif. Jakarta: Elfawaz. 1993.

Aceh. Abu Bakar. *Syi'ah: Rasionalisme Dalam Islam*. Solo: Ramdhani, 1988.

Anderson. J.N.D.. *Hukum Islam di Dunia Modern*. alih bahasa. Machnun Husein. Surabaya: Amarpress. 1990.

- Efendi, Agus, "Sahabat: Mitos dan Realitas". dalam *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung: Rosdakarya, 1990.
- Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunni-Syi'ah*. alih bahasa. Asep Hikmat, Bandung: Pustaka, 1988.
- Hasem, O. *Saqifah: Awal Perselisihan Umat*. Jakarta: YAPI, 1989.
- Hasjmi, A., *Di Mana Letaknya Negara Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Hasyim, Umar, *Apakah Anda Termasuk Golongan Ahlus Sunnah wal Jama'ah?*, Surabaya: Bina Ilmu, 1978.
- Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi, Opisisi dan Masyarakat Madani*, alih bahasa. Muhammad Abdul Gaffar, Bandung: Mizan, 1996.
- Ibn Khaldun, Abdurrahman, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Qutaibah, Abi Muhammad ibn Muslim ad-Dainuri, *al-Imāmah wa as-Siyāsah*, 2 jilid. Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Bābi al-Halabi wa Auladuhu, 1969.
- Ibn Taimiyah, Taqiyuddin, *as-Siyāsah asy-Syar'iyyah fi Islāhi ar-Rā'iy wa ar-Ra'iyyah*, Mesir: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1969.
- Ihsan, Sadiq, *Kedudukan Sunnah Rasulullah*, dalam *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Rosdakarya: 1990.
- Isik, Husein Hilmi, *Perjuangan Kaum Sunni Modern*. alih bahasa Lies Setiyasih, Bandung: Risalah, 1984.
- Ismail, Yahya, *Hubungan Penguasa Dan Rakyat Dalam Perspektif Sunnah*, alih bahasa. Andi Suherman, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Femerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, alih bahasa. Mufid, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *as-Siyāsah asy-Syar'iyyah*, ttp.: Dār al-Anṣar wa an-Naṣr, 1977.
- Khan, Qomaruddin, *Tentang Teori Politik Islam*, alih bahasa. Taufik Adnan Amal, Jakarta: Pustaka, 1987.
- Maududi, 'Abul A'la, al-.. *Khilafah dan Kerajaan*, alih bahasa. Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1988.

- . *Politik Alternatif: Suatu Perspektif Islam*. alih bahasa. Muhammad Nur Hakim. Jakarta: Gema Insani Press, 1991.
- . *Sistem Politik Islam*. alih bahasa Asep Hikmat. Bandung: Mizan, 1993.
- Mawardi. Abi Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Basri. al-., *al-Aḥkām as-Sultānīyah*. ttp.: Muṣṭāfa al-Babi al-Halabi wa Auladuhū, 1973.
- Misri. Muhammad Abdul Hadi. al-.. *Ahlis Sunnah wal Jama'ah*, alih bahasa Zaid Husein, Surabaya: Central Media, 1990.
- Moment, M., "Penguasa dan Kaum Oposisi Dalam Aliran Syi'ah Imamiyah" dalam *Fundamentalisme Islam*. alih bahasa. Yudian W. Asmin. Yogyakarta: Pustakla Pelajar, 1994.
- Mortimer, Edward. *Islam dan Kekuasaan*. alih bahasa. Ena Hadi, Bandung: Mizan, 1984.
- Mousawi. Ahmad. "Teori Wilayat Faqih: Asal Mula dan Penampilannya Dalam Literatur Hukum Syi'ah" dalam *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*. Mumtaz Ahmad (ed.), alih bahasa. Ena Hadi, Bandung: Mizan, 1993.
- Musa. M. Yusuf. *Politik dan Negara Dalam Islam*. alih bahasa. M. Thalib, Surabaya: Al-Ikhlās, 1990.
- Musawi. A. Syarafuddin. al-.. *Dialog Sunnah-Syi'ah*. alih bahasa. Muhammad al-Paqir, Bandung: Mizan, 1990.
- Muṭahhari, Murtaza, *Imāmah dan Khilafah*. alih bahasa. Satrio Pinandito. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- . *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*. alih bahasa. Agus Efendi. Bandung: Mizan, 1992.
- Muzaffari, Mehdi, *Kekuasaan Dalam Islam*, alih bahasa. Abduirrahman Ahmed. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994.
- Nahdi. A. Saleh. *Saqifah: Awal Persatuan Umat*. Surabaya: Al-Ikhlās, 1989.
- Osman. Fathi. "Bai'at al-Imam: Kesepakatan Pengangkatan Kepala Negara Islam" dalam *Masalah-Masalah Teori Politik Islam* Mumtaz Ahmad (ed.), alih bahasa Ena Hadi, Bandung: Mizan, 1993.
- Puar, Yusuf Abdullah. *Perjuangan Ayatullah Khomeini*. Jakarta: Pustaka Antara, 1979.

Qumaihah. Jabir. *Oposisi Menurut Islam*. alih bahasa. Masykur Hakim. Jakarta: Gema Insani Press. 1988.

Rahman. Fauzi. *Upaya al-Maududi Memurnikan Ajaran Islam*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press. 1990.

Rahman. Fazlur. *Membuka Pintu Ijtihad*. alih bahasa. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka. 1991.

———. "Prinsip Syura dan Peran Umat Dalam Islam" dalam *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*. alih bahasa. Ena Hadi, Bandung: Mizan. 1993.

Rahmat, Jalaluddin, *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan, 1990.

———. "Apakah Israiliyat Itu?". dalam *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung: Rosdakarya. 1990.

Sachedina, A. Abdul Aziz. *Kepemimpinan Dalam Islam Perspektif Syi'ah*. alih bahasa. Ilyas Hasan, Bandung: Mizan. 1991.

Sihbudi, M. Riza, *Bara Timur Tengah*. Bandung: Mizan. 1991.

Siddiqie, Nouruzzaman. as-.. *Syi'ah dan Khawarij dalam Islam*. Yogyakarta: LP3M. 1993.

Syafi'i, Muhammad ibn Idris. asy-.. *Ar-Risālah*. ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabi. t.t.

Syari'ati, Ali. *Ummah dan Imāmah*. alih bahasa: Afif Muhammad. Jakarta: Pustaka Hidayah. 1995.

———. *Islam Agama Protes*. alih bahasa. Satrio Pinandito, Jakarta: Pustaka Hidayah. 1993.

———. *Islam Maḏhab Aksi dan Pemikiran*. alih bahasa. Asep Hikmat, Bandung: Mizan. 1991.

———. *Musyawarah atau Wasiat*. alih bahasa. M. Hasyim. Jakarta: YAPI. 1989.

Sya'idi, Abdul Muta'ali. asy-.. *as-Siyāsah al-Islāmiyah fi 'Ahdī al-Khulafā' ar-Rāsyidūn*. ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabi. 1962.

Tirkamani, Muhammad Ahmad. at-.. *Ta'rif bi Maḏhabisy Syi'ah al-Imāmiyah*. ttp.: Dār Umar li an-Naṣr wa at-Tauzi'. 1987.

Tabaṭaba'i, Sayyid Muhammad Husein. *Islam Syi'ah: Asal-Usul dan Perkembangannya*. alih bahasa. Johan Efendi, Jakarta: Grafiti. 1993.

Watt. W. Motgomery. *Pemikiran Teologi dan Filsafat Islam*. alih bahasa. Umar Basalim. Jakarta: P3M. 1987.

———. *Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah*. alih bahasa. Johan Efendi, Jakarta: P3M. 1988.

Yafie. Ali. "Sistem Pengambilan Hukum Oleh A'immatul Mazahib", dalam *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung: Rosdakarya. 1990.

———. *Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung: Mizan. 1993.

Zaenuddin. A. Rahman. *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibn Khaldun*. Jakarta: Gramedia. 1992.

Zahir. Ihsan Ilahi. *Tikaman Syi'ah Terhadap Sahabat Nabi*, alih bahasa. Mustafa Hamdani. Solo: Pustaka Mantiaq, 1987.

D. Buku-buku Lain

Budiardjo. Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. 1993.

Dahl. Robert A.. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. 2 jilid. alih bahasa. A. Rahman Zaenuddin. Jakarta: Yayasan Obor. 1992.

Hadi. Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yasbit. Fakultas Psikologi UGM. 1984.

Hasan. Hasan Ibrahim. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. alih bahasa. Muhammad Hilmi. Bandung: Kota Kembang. 1989.

Herichayono. Cheppy. *Ilmu Politik Dalam Perspektif*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1991.

———. *Ideologi Politik*. Yogyakarta: Hanindita. 1988.

Hoogerwerf. A.. *Politikologi*. Jakarta: Erlangga. 1985.

Iver. M.C.. *Jaring-Jaring Pemerintahan*. 2 jilid. alih bahasa. Laila Hasyim. Jakarta: Aksara Baru. 1983.

Moleong. Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. 1993.

Morgenthau. Hans J.. *Politik Antar Bangsa*. 2 jilid. alih bahasa. A.M. Fatwan. Jakarta: Yayasan Obor. 1991.

Munawwir. Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: tnp.: t.t.

- Nazir, Muh., *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Pickles, Dorothy, *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1960.
- Rapar, J.H., *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Russel, Bertrand, *Kekuasaan: Sebuah Analisa Sosial Baru*, alih bahasa. Hasan Basri, Jakarta: Yayasan Obor, 1988.
- Sabon, Max Boli, *Ilmu Negara*. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Schmid, Jhr. J.J. Von, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*. alih bahasa. R. Wiranto. Jakarta: PT. Pembangunan, 1988.
- Sukarna, *Ideologi: Suatu Studi Ilmu Politik*. Bandung: Alumni, 1981.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Syafi'i, Enu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Eresco, 1992.
- Thomson, David, "Rousseau dan Kehendak Umum". dalam *Pemikiran-Pemikiran Politik David Thomson* (ed.), alih bahasa. API. Jakarta: Aksara Persada, 1986.
- Tim Penyusun Pustaka-Azet, *Leksikon Islam*. Jakarta: Pustazet, 1990. 5 jilid.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1988.

E. Artikel dan Majalah

- Akbar, Wahid, Tasawuf Titik Temu Sunni dan Syi'ah. *Al-Hikmah* edisi Juli-Oktober, 1990.
- Madjid, Nurcholis, "Sekilas Tinjauan Historis Tentang Fahaman Sunnah-Syi'ah", *makalah* Seminar Tentang Sunnah-Syi'ah. yang diselenggarakan KOMPAQ. tanggal 8 Desember 1987, di Wisma Sejahtera IAIN Jakarta.
- Mardiana, Erlangga, "Ilmu Pengetahuan dan Kekuasaan". *Kompas*, edisi 15 April 1996.

Najjar, Fauzi M. "Demokrasi Dalam Filsafat Politik Islam". dalam *Al-Hikmah* edisi Juli-Oktober, 1990.

Rahmat, Jalaluddin. "Kepemimpinan Politik dan Cita Keadilan: Perspektif Islam". *Al-Hikmah*, edisi Januari-Maret, 1993.

———, "Demokrasi Tanpa Pesta Melihat pemilu di Iran" dalam *Republika* edisi 15 Januari 1993.

Sihbudi, M. Reza, "Tinjauan Teoritis dan Praktis Atas Konsep Vilayati-Faqih, makalah Seminar tentang sistem kenegaraan dalam perspektif Islam, diselenggarakan Jurnal Ulumul Qur'an, di Manggala Wanabakti, Jakarta, tanggal 28 Januari 1993.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA